

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA  
(Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula)**

**IKBAL SAPSUHA  
VERY .Y. LONDA  
NOVIE PALAR**

***ABSTRACT :** The employment issue in the Sula Islands District has now reached an appreciable condition marked by large unemployment and underemployment, relatively low and uneven incomes, on the contrary unemployment and high unemployment are a waste of human resources and potential, the burden of family and society, the main source of poverty, can encourage increased social and criminal unrest, and can hamper development in the long run, the future development of the Indonesian nation.*

*Low unemployment rates can reflect good economic growth, and can reflect improvements in the quality of the livelihoods of the population and increased equity of income, hence the welfare of the population may then increase. Based on the description on the background above, the authors are interested in conducting research with the title "Implementation of Local Government Policy In Countering Unemployment In Sula Islands District, North Maluku Province".*

***Keyword :** Implementation of policies, local government, unemploye*

## **PENDAHULUAN**

Pengangguran merupakan istilah yang tidak asing lagi di setiap daerah, baik dalam tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, karena pada dasarnya pengangguran adalah suatu keadaan yang tidak terelakkan keberadaannya, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju sekalipun, tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sula sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memperhatikan yang ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata, sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya manusia dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan,

dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang, pembangunan bangsa Indonesia kedepan.

Menurut Ealau dan Prewit (Suharto, 2008:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Menurut Titmuss (Edi Suharto, 2008:7) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada tindakan.

Menurut Magill (Suharto, 2008:10) kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public-policy). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, eJournal Ilmu Administrasi Negara Volume 3, Nomor 2, 2014 : 718-729 722 komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial

merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Pendapat Marilee S. Grindle (Dalam Samodra, 1994, 22-24) bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya di tentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan, isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini akan meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor actor yang terlibat.

Banyak persepsi menyatakan bahwa dimensi implementasi kebijakan publik adalah bagian yang terpisahkan dari perencanaan kebijakan, padahal keduanya saling merupakan satu kesatuan yang saling memberikan dukungan keberhasilan dalam proses tersebut, suatu kebijakan yang telah di sahkan dan siap untuk di laksanakan, nantinya belum tentu dapat sepenuhnya di laksanakan, seperti yang di harapkan oleh pembuat kebijakan, (Winarno 1998;72) adapun model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, (1975;462) sebagai A model of the Policy Implementation Process, dengan mengemukakan enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (six variables which shape the linkage between policy and performance) serta pentingnya prosedur implementasi memperhatikan konsep-konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Peneliti akan terlibat langsung dengan obyek penelitian, hal ini sangat diperlukan dalam metode kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (Natural) di mana peneliti akan berfungsi sebagai instrumen kunci, (Sugiyono, 2001; 4) hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi, dan juga perlu di ingat bahwa, metode kualitatif tersebut lebih mudah

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri

Bertitik tolak dari pendekatan di atas, maka jenis penelitian implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara termasuk penelitian dengan deskriptif kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah implimentasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: 1. Standards and objectives policy(standar dan sasaran kebijakan),2.Performance(sumberdaya),3.Int erorganizational communication and enforcement activities(komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas),4. Characteristics the implementing agencies(karakteristik agen pelaksana atau implementor), 5. The disposition of implementors(disposisi implementor), 6. Economic, social and political conditions(kondisi sosial, ekonomi, dan politik).

Lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan para seluruh staf ataupun lembaga instansi terkait sebagai penerima manfaat (Resipien) di mana pengembangannya secara menyeluruh yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula.

Berangkat dari penjelasan permasalahan di atas, setidaknya berlaku pula di Sekretariat kantor ketenaga kerjaan Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai lokasi

penelitian. Dimana pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pernah melakukan implementasi di bagian struktur dengan hasil implementasi kebijakan, yaitu dengan penyederhanaan struktur dengan menggabungkan bagian data-data penggangguan pada fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan mengingat terdapat kedekatan urusan antara pengelolaan dan barang daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi strata satu (S-1) untuk itu penulis mengangkat judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulang Pengangguaran Di Kabupaten Kepulauan Sula (Suatu Studi Di Kantor Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara).

Informan adalah, orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, oleh karena itu seorang informan harus benar tahu, ataupun pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, memilih seseorang informan harus dilihat kompetensinya, bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya Agar dapat mengumpul informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada 4 unsur secara akurat dan sebagai informan penelitian, pemilihan berdasarkan di atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian, berikut ini informan yang menjadi sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, 1 (SatuOrang)
2. Sekretaris Kantor Dinas Tenaga Kerja, 1(Satu Orang)
3. Sekretaris Perencanaan dan Keuangan, 1(Satu Orang)

4. Bidang Penempatan dan Latihan ProduktivitasOrang 1 (Satu orang)
  5. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, 1 (SatuOrang)
  6. Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, 1 (Satu orang)
  7. Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, 1 (Satu orang)
  8. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, 1 (Satu orang)
  9. Seksi Sumberdaya Masyarakat Transmigrasi, 1 (Satu orang)
  10. Seksi Pengembangan Usaha Sarana Dan Prasarana, 1 (Satu orang)
- Jumlah totalitas 10 (Sepuluh Orang)

Dalam penlitian ini yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian yang dilakukan ini,observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi struktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempat nya”. Alat yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan daftar observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem wawancara terstruktur. Alat yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara yaitu pedoman wawancara, tape recorder dan material lain yang mendukung dalam pelaksanaan wawancara. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur- literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. ulang data

Dalam proses teknik pengumpulan data, dengan menggunakan teknis analisis kualitatif yaitu menggunakan teknik, dan setelah data terkumpul selanjutnya di analisis agar dapat memberikan informasi yang jelas,

sebagai unit analisis dalam penelitian kebijakan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara kepada kepala keluarga penerima manfaat.

Analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka, biasanya analisis ini digunakan jika yang dapat bersifat monografis atau kasus sehingga tidak disusun pada suatu struktur yang berbentuk angka data yang terkumpul nantinya selanjutnya di analisis dalam penelitian implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dengan format penelitian deskriptif kualitatif maka analisis data dilakukan melalui interpretasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris, interpretasi data analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sugiyono, (2009:15)

1. Pengumpulan data, dengan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder, wawancara dan observasi untuk memperoleh data bersifat primer, data mereka yang terkait dengan kebijakan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara baik dari unsur pemerintah daerah, konsultan, maupun penerima manfaat.
2. Penilaian data, dengan memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, dan obyektifitas yang di tempuh melalui kategori data primer dan sekunder dengan pencatatan yang relevan serta melakukan kontrol apakah data tersebut relevan untuk dapat digunakan antara lain data statistik laporan tahunan kliping dari berbagai media massa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, maka telah

dilakukan penelitian dengan pedoman wawancara yang dilakukan kepada 10 informan, yaitu diantaranya :

- 1) Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja (Nasir Yoisangdji. SP)
- 2) Sekretaris Kantor Dinas Tenaga Kerja (Rahman Buamona. S.IP)
- 3) Sekretaris Perencanaan dan Keuangan (Nurlaila Usia. S. AP)
- 4) Bidang Penempatan dan Latihan Produktivitas (Karim Pahi. S.Ag)
- 5) Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial (Marlin Sanaba. ST)
- 6) Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (Antoni Kailul S. HUT)
- 7) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Jafar Sapsuha S.SOs)
- 8) Seksi Penempatan Tenaga Kerja (M. Iqbal Umanahu. S.IP)
- 9) Seksi Sumberdaya Masyarakat Transmigrasi (Sahrul Wanci. SH)
- 10) Seksi Pembangunan Usaha Sarana dan Prasarana (Amat Pahi. SS)

Maka diperoleh deskripsi hasil wawancara berdasarkan 10 informan di atas sebagai berikut :

1. Pengangguran  
Pengangguran merupakan orang-orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang sedang mencari pekerjaan tetap dalam pengertian mereka yang bekerja paruh waktu hanya beberapa hari dalam seminggu atau tak menentu. Terjadinya pengangguran dikarenakan penambahan angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
2. Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a) Penciptaan kesempatan kerja diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan ketrampilan yang berdaya saing melalui kursus
  - b) Terserapnya angkatan kerja yang siap dilatih

- c) Mengembangkan kemampuan intelektual dan aspirasi penganggur dalam mengambil keputusan guna memanfaatkan dan mendayagunakan potensi sumber daya lokal sebagai upaya penanganan persoalan penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan usaha seluas-luasnya.
  - d) Pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan masyarakat penganggur yang berkarakter, menghormati dan mencintai teknologi tepat guna sebagai basis penciptaan kesempatan kerja melalui kegiatan usaha ekonomi produktif dan berkelanjutan.
  - e) Pembentukan dan pengembangan sikap mental, jiwa dan semangat kewirausahaan serta kemandirian bagi generasi muda.
  - f) Tercapainya perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Strategi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
- Salah satu sasaran strategi dalam upaya perluasan lapangan kerja adalah penyusunan perencanaan Tenaga Kerja Daerah melalui penciptaan model-model perluasan lapangan kerja dikemas dalam bentuk kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat antara lain :
- a) Meningkatkan pelayanan terhadap perusahaan yang belum menerapkan norma kerja sama optimal
  - b) Mempromosikan hasil ketrampilan bermuatan lokal
  - c) Membentuk wadah koordinasi perluasan kesempatan kerja
  - d) Membangun dan mengembangkan jaringan kerja sama perluasan kesempatan kerja dengan semua stakeholders khususnya yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula
  - e) Memberdayakan potensi SDM dan SDA dengan pemanfaatan teknologi tepat guna
  - f) Melakukan Gerakan Penanggulangan Pengangguran Terpadu (GPPT)
  - g) Menciptakan dan mengembangkan model-model perluasan kesempatan kerja
  - h) Penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan padat karya produktif, bidang pertanian, perikanan, peternakan, air bersih, tambatan perahu dan jalan setapak
  - i) Penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
  - j) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan
  - k) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan pedagang asongan
  - l) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan perbengkelan
  - m) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan pertukangan
  - n) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan percetakan dan sablon
  - o) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan paving blok dan batu angin
  - p) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan instalasi listrik
  - q) Penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan tata rias kecantikan
  - r) Penyerapan tenaga kerja melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri (TKPM)
  - s) Melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ketenaga kerjaan terhadap karyawan di perusahaan/pengusaha agar tercapai perlindungan tenaga kerja/hubungan industrial dalam penarapan norma-norma tenaga kerja
  - t) Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bermuatan lokal dan
  - u) Pembinaan dan pelatihan home industri
4. Beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan

pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula antara lain :

- a) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sula No.2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sula.
- b) Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 188.4/09/DTT-KS/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Database Ketenagakerjaan.

#### 5. Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran di Kepulauan Sula

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan maka diperoleh faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula antara lain :

- a) Rendahnya mutu kualitas pencari kerja
- b) Kompetensi lulusan dibawah standar
- c) Tidak seimbangnya jumlah penduduk/angkatan kerja dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia
- d) Rendahnya ketrampilan masyarakat

#### **Pembahasan**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program kegiatan serta pelatihan kerja yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran sehingga diharapkan mampu mewujudkan perubahan pada kondisi sosial masyarakat sehingga masalah pengangguran tidak menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat.

Implementasi program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 melalui program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK). Kedua program tersebut mencakup 3 (tiga) item kegiatan diantaranya kegiatan Padat Karya Produktif, Padat Karya Infrastruktur dan Pelatihan Berbasis Kemasyarakatan.

Kegiatan Padat Karya Produktif mencakup bidang pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 88 orang sedangkan pada kegiatan Padat Karya Infrastruktur yaitu pembuatan jalan setapak di pedesaan pada 5 (lima) desa diantaranya desa Pastina, Bajo, Fagudu, Wainin dan Waisum. Kegiatan ini berlangsung dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 616 orang, sedangkan pada kegiatan Pelatihan berbasis masyarakat terfokus pada berbagai kegiatan pelatihan kemasyarakatan dengan menyediakan 10 (sepuluh) bentuk pelatihan diantaranya :

- 1) Pelatihan perbengkelan
- 2) Pelatihan keterampilan mebel
- 3) Pelatihan pendataan angkatan kerja
- 4) Study Kelayakan BLK
- 5) Daur ulang sampah
- 6) Pelatihan padat karya semen
- 7) Pelatihan pertukangan
- 8) Pelatihan stempel dan cap expres
- 9) Pelatihan jahit-menjahit
- 10) Pelatihan mengemudi

Kegiatan pelatihan berbasis masyarakat diatas menyerap tenaga kerja sebanyak 809 jiwa yang dilaksanakan di 14 (empat belas) desa se-Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Melalui program kegiatan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah diuraikan diatas maka terlihat bahwa telah cukup baik mengimplementasikan kebijakan-kebijakan daerah Kabupaten Kepulauan Sula terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan pengangguran yang ada.

Dalam program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 terlihat bahwa kegiatan yang sangat dominan yaitu pelatihan kemasyarakatan. Hal ini mengingat bahwa mayoritas penduduk hanya bermata pencaharian bertani dan nelayan sehingga masih sangat minim pengetahuan dan keterampilan di bidang-bidang selain kedua bidang tersebut. Dengan berbagai tindakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang melibatkan banyak masyarakat tersebut sehingga dapat meningkatkan kemampuan kerja agar lebih terciptanya lapangan kerja di berbagai bidang.

Pada tahun 2015 dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam penanggulangan pengangguran. Terdapat 2 (dua) program kegiatan yaitu Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK). Program kegiatan pada tahun 2015 hanya mencakup dua item yaitu kegiatan pada karya infrastruktur dan pelatihan berbasis masyarakat. Kedua kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 226 orang.

Secara keseluruhan dari uraian diatas terlihat bahwa implementasi program-program kegiatan pemerintah daerah dalam penanggulangan pengangguran yang dilaksanakan oleh instansi terkait, dalam hal ini dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berlangsung dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Penyerapan tenaga kerja terbanyak dapat dilihat pada program kegiatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sedangkan pelaksanaan program kegiatan di tahun 2015 telah terjadi penurunan jumlah tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena pada program pemberdayaan masyarakat sebelumnya telah banyak menciptakan masyarakat yang mampu mandiri dan kreatif dalam bekerja sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan orang-orang disekitar mereka sehingga munculnya investasi baru dan tumbuhnya perekonomian daerah yang berimplikasi penciptaan lapangan kerja baru sebab Sumber Daya Manusia

(SDM) merupakan aset daerah sebagai salah satu faktor dominan dalam pembangunan disemua sektor, mengingat titik sentral permasalahan tersebut ada pada faktor manusianya.

Bila dicermati, maka terlihat bahwa angka kerja di Kabupaten Kepulauan Sula telah cukup meningkat. Namun demikian angka pengangguran juga tetap menjadi suatu barometer yang selalu perlu dicari regulasi kebijakan-kebijakan daerah sebagai solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan pengangguran sebab secara harfiah maupun secara kasat mata angka pengangguran di desa-desa kurang nampak signifikan karena masyarakat desa dalam kesehariannya banyak beraktifitas sebagai petani, nelayan dan peternak serta usaha lainnya yang dapat menopang pendapatan penghasilan. Sebuah ungkapan yang tersirat bahwa orang yang tidak menganggur karena bekerja belum dapat dipastikan, untuk itu diperlukan pembinaan, kepedulian dan pelatihan dari semua pihak baik lembaga swasta maupun pemerintah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian melalui pedoman wawancara terhadap sejumlah responden tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik yakni pembangunan kualitas dalam pembangunan manusia yang maju dan mandiri melalui peningkatan ketrampilan dan pelatihan-pelatihan yang berbasis masyarakat sehingga pencari kerja memiliki *skill* dan ahli teknologi yang handal dalam bekerja.
2. Pembangunan dititik beratkan pada bidang ekonomi yang merupakan

penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

3. Kebijakan pemerintah telah dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan pelatihan dalam meningkatkan kualitas kemampuan bagi tenaga kerja yang kurang terdidik atau terlatih yang sekarang telah berkiprah pada usaha-usaha kecil dan menengah.

### **Saran**

Mengacu pada hasil dalam penelitian ini, maka dipandang perlu memberikan beberapa saran sebagai solusi dalam implementasi penanggulangan pengangguran bagi pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Dapat menyusun program-program ketenaga kerjaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sebab seiring perkembangan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu selalu memiliki kondisi serta kebutuhan lapangan kerja yang berbeda.
2. Bersama instansi-instansi terkait se-Kabupaten Kepulauan Sula agar dapat melakukan *sherring* program yang bersifat pemberdayaan berbasis masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja sehingga semakin dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Memberdayakan dan melatih masyarakat yang memiliki ketrampilan yang jarang tersentuh seperti pandai besi, pembua anyaman bambu dan pembuat anyaman tikar.
4. Melakukan pemberdayaan serta pelatihan-pelatihan ketrampilan khusus terhadap peyandang cacat sehingga lebih terjadi pemerataan dalam pemberdayaan manusia demi meningkat kesejahteraan hidup masyarakat.

Marilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third* Press.

Suharto Edi, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Jakarta. Alfabeta.

Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: CV

Van Meter dan Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Yogyakarta.

Winarno Budi, 1998, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo

### **DAFTAR PUSTAKA**